

BAB I

PENDAHULUAN

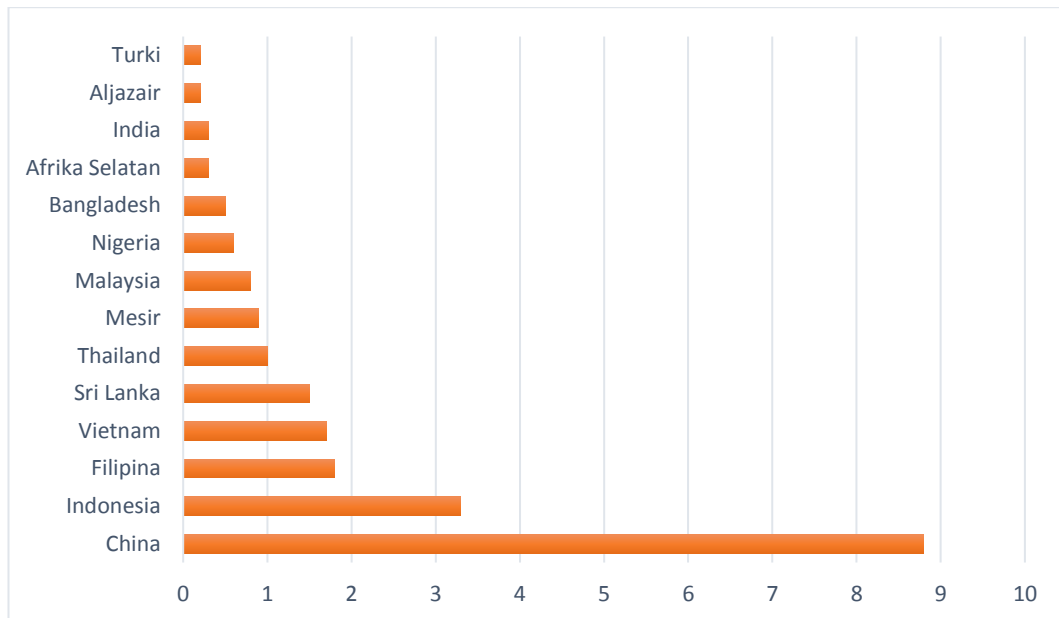
I.1. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat disangkal bahwa sistem pasar bebas yang hampir diadopsi oleh seluruh negara di dunia telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Jasa dan terutama barang dapat diperoleh secara cepat dan dengan harga yang relative murah. Namun, hal tersebut tidak ragu lagi menimbulkan sifat konsumtif di beberapa kalangan masyarakat. Sifat konsumtif tersebut, walaupun memberikan keuntungan bagi perusahaan, telah memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan yaitu produksi limbah¹ yang berlebihan.

Baik di tingkat nasional maupun daerah, limbah menjadi suatu permasalahan yang besar baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada negara berkembang, masalah limbah seringkali tidak digubriskan demi memenuhi aspek-aspek yang dinilai lebih strategis seperti perkembangan dan pembangunan infrastruktur. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup juga sering kali tidak menjawab permasalahan lingkungan yang sudah terjadi di negara tersebut. Terlebih lagi, tidak jarang aktivitas tersebut justru menimbulkan permasalahan lain selain masalah limbah seperti peningkatan polusi terutama di kota-kota besar dan daerah pariwisata. Daerah industri dan daerah pariwisata juga kerap menjadi lokasi yang memproduksi limbah plastik terbesar yang seringkali disalahkelolakan oleh pemerintah kota tiap negara. Hal tersebut juga didukung dengan regulasi-regulasi mengenai pengelolaan limbah yang tidak memadai.

¹ Untuk memperjelas, konteks limbah dan sampah dalam penelitian ini akan digunakan secara bersamaan. Selama tidak ada penjelasan lebih lanjut, kata 'limbah' atau 'sampah' akan diartikan sebagai barang sekali pakai yang dikumpulkan dan dibuang oleh masyarakat baik organik maupun non-organik.

Grafik 1 Perbandingan Negara dengan Tingkat Salah Kelola Sampah Plastik tahun 2010 dalam juta ton



Sumber: BBC, data diolah oleh penulis

Daerah-daerah wisata dan industry juga seringkali dianggap menawarkan prospek yang menjanjikan terutama untuk perekonomian masyarakat sehingga tidak jarang ditemukan kepadatan populasi di daerah tersebut. Namun demikian, hal yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Kepadatan penduduk mendorong masyarakat terutama yang berada di kalangan bawah untuk mencari dan/atau mendirikan tempat tinggal di wilayah yang kurang layak seperti di sekitar tempat pembuangan atau daerah industry tempat mereka bekerja dimana kondisi lingkungannya sering kali tidak sesuai dengan standar kualitas hidup manusia. Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2016 sekitar 4,2 juta jiwa meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara dimana 16 persen dari total jiwa itu adalah akibat kanker paru-paru akibat paparan polusi (WHO, 2016).

Ditambah dengan sistem pengolahan limbah yang belum memadai, limbah rumah tangga hanya menambah tingkat karbon dioksida dan metana di udara.

Gas metana dalam kadar yang rendah tidak memiliki dampak kritis bagi kesehatan manusia, namun gas tersebut merupakan salah satu dari tiga gas rumah kaca yang paling berbahaya bagi lingkungan. Seiring berjalannya waktu, hal ini justru mendorong terjadinya krisis-krisis lingkungan dan kesehatan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan dan meningkatnya angka mortalitas. Krisis-krisis inilah yang pada akhirnya membuat isu-isu lingkungan di rana hubungan internasional menjadi sama pentingnya dengan isu-isu tradisional seperti isu ekonomi, politik, dan keamanan. Hal ini juga disebabkan karena isu-isu lingkungan dapat mempengaruhi sektor-sektor tradisional tersebut apabila tidak diselesaikan dengan cepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 dimana beberapa poin dari MDGs tersebut adalah untuk menghapus kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim serta memastikan kelestarian lingkungan hidup. Ketika periode dari MDGs selesai di tahun 2015, PBB mengeluarkan inisiatif baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana terdapat sebanyak 17 tujuan yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2030. Berbeda dengan pendahulunya, tujuan-tujuan dalam SDGs lebih terinci dan terfokus, seperti digabungnya tujuan *improve maternal health dan combat HIV/AIDS and tuberculosis* dalam MDGs menjadi tujuan ke-tiga dalam SDGs yaitu *Good health and Well-being*. Namun demikian, tujuan-tujuan yang dimasukkan ke dalam SDGs ini merupakan masalah lintas-batas yang penyelesaiannya pun memerlukan tindakan bersama. Faktor tersebut yang membuat beberapa akademisi melihat bahwa rancangan dari tujuan MDGs ditargetkan untuk masyarakat dunia yang berada di titik termiskin sehingga *middle income countries* secara tidak langsung dikecualikan dalam pemberian bantuan (soas.ac.uk).

Selain itu, perbedaan antara MDGs dan SDGs dapat dilihat dari mekanismenya. Skema MDGs menerapkan pemberian bantuan dari negara maju ke negara berkembang dalam rangka pemenuhan tujuannya. Hal ini menimbulkan kritik terhadap kerangka MDGs yang dimana hasil dari MDGs

tersebut tidak terjadi dan/atau dirasakan secara merata (Fehling et al., 2013, pp. 1109-1119). Maka dari itu untuk kelancaran implementasinya, PBB merubah skema dan kerangka dari SDG. Alih-alih hanya menargetkan negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang. SDG menerapkan mekanisme dimana semua negara anggota PBB secara sukarela mencoba untuk memenuhi tujuan-tujuan dari SDGs tersebut, baik secara mandiri ataupun melalui skema kerjasama dengan negara anggota PBB lainnya.

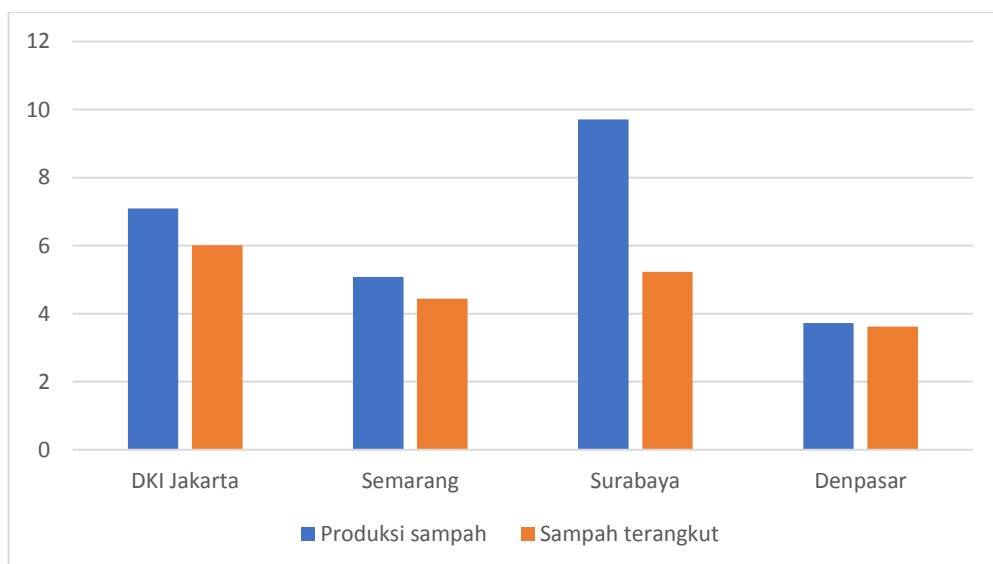
Kerjasama dinilai oleh beberapa pengamat dan akademisi, terutama dalam bidang ekonomi politik, sebagai suatu aktivitas yang berperan besar dalam pembangunan di suatu negara. Hal itulah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu contohnya adalah kerjasama bilateral antara Indonesia dan Denmark. Walau terpisah jarak sejauh sebelas ribu kilometer namun kedua negara ini memiliki beberapa kesamaan. Beberapa kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut adalah Denmark dan Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh perairan. Hal tersebut membuat kedua negara tersebut sebagai negara yang mengandalkan sisi kemaritimannya baik pada sektor ekonomi maupun sektor keamanan. Kedua, Denmark dan Indonesia sama-sama melakukan aktivitas ekonomi di sektor pangan dimana ekspor hewani Denmark dan Indonesia mencapai 14 persen dari total ekspor kedua negara tersebut (OECD, 2017).

Selain dua kesamaan tersebut, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Denmark juga didorong oleh adanya kepentingan yang bersinggungan dari kedua negara tersebut. Salah satunya terlihat dari komitmen Indonesia dan Denmark pada inisiatif Perjanjian Paris dan SDGs yang dikeluarkan pada tahun 2015. Dengan menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia menargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sebesar 29 persen atau 41 persen melalui dana bantuan luar negeri pada tahun 2030 (DEA, 2018, p. 2).

Sayangnya, Indonesia saat ini masih mengalami beberapa masalah di sektor lingkungan dan sektor energinya. Kota-kota urban dengan tingkat

industrialisasi yang tinggi seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, pengelolaan limbah masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis olah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana produksi limbah di kota-kota tersebut dan pengelolaannya masih mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Situasi yang sama juga dialami oleh daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendorong ekonominya, seperti Bali. Status Bali sebagai daerah wisata baik domestic maupun mancanegara juga mendorong pemerintah daerahnya untuk mengatasi permasalahan limbah agar tidak mengganggu arus perekonomian di daerah tersebut.

Grafik 3 Volume Sampah di Kota-Kota Besar di Indonesia (per meter kubik) tahun 2016

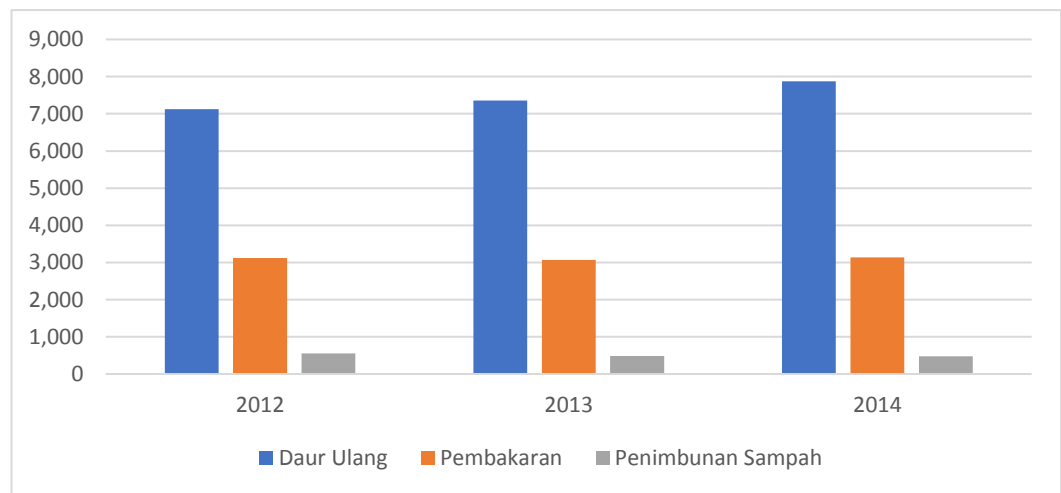


sumber: BPS, data diolah oleh peneliti.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan di Denmark dimana masalah limbah hampir tidak terdengar di setiap wilayahnya. Hal ini dikarenakan sistem pengolahan limbah di Denmark terbilang efisien dan beragam dimana di tahun 2014 hampir 67 persen limbah di Denmark di daur ulang dan 26 persen di bakar secara aman. Denmark merupakan negara yang memiliki teknologi canggih dan pengalaman yang sukses dalam menerapkan penggunaan energi terbarukan dan

manajemen lingkungan. Selain itu, Denmark juga merupakan salah satu negara yang secara konsisten mengadvokasikan akan kebijakan iklim di forum internasional. Hal itulah yang mendorong Denmark untuk bekerjasama dengan banyak negara yang dilihat memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan iklim dan penggunaan energi terbarukan dalam *energy mix* negara tersebut.

Grafik 4 Total Limbah per 1000-ton Sesuai Jenis Pengolahannya di Denmark 2012-2014



Sumber: *Waste Statistic 2014* dari *Ministry of Environment and Food of Denmark*, data diolah oleh peneliti.

Indonesia merupakan salah satu negara yang besar baik dari segi spasial ataupun segi populasi (Nag, 2018). Maka bukan sesuatu yang mengejutkan apabila Indonesia menjadi pasar yang strategis dan berpotensi besar bagi negara-negara lain. Dan layaknya negara berkembang lainnya, Indonesia juga gencar melakukan pembangunan di setiap daerah-daerahnya. Contohnya, pada tahun 2014² pemerintah Indonesia mengeluarkan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* yang mengacu pada pilar

² Merujuk pada Peraturan Presiden nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

pembangunan di Indonesia yang *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-jobs* serta *pro-environment*.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan hal tersebut dapat membawa beberapa rintangan dimana salah satunya adalah distribusi dan persebaran populasi. Hingga saat ini, pulau Jawa menjadi pulau dengan populasi terpadat di dunia dan diikuti dengan pulau Honshu di Jepang. Padatnya pulau Jawa juga didorong dengan lokasi ibukota yang terletak di pulau tersebut serta pesatnya modernisasi yang membuat ribuan orang berpindah tempat ke pulau Jawa. Tanpa adanya penanganan dan pengelolaan yang benar dan tepat, hal-hal tersebut membawa banyak masalah terutama masalah lingkungan.

Kepadatan di Pulau Jawa membuat pemerintah pusat maupun pemerintah kota mengubah lahan-lahannya untuk dijadikan tempat tinggal atau menjadi lahan industri. Namun, kegiatan tersebut jarang sekali diikuti dengan manajemen pengelolaan lingkungan seperti dimana sampah atau limbah akan dibuang atau bagaimana sampah akan diproses sebelum dibuang. Pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun di daerah juga belum mampu memberikan opsi atas pengelolaan limbah sehingga limbah-limbah tersebut hanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Pada akhirnya, kurangnya manajemen lingkungan membuat warga yang tinggal di daerah tersebut membuang sampah sembarangan dan membuat penumpukan sampah berlebih tidak hanya di TPA tetapi juga di lokasi-lokasi yang tidak ditujukan sebagai TPA. Tidak hanya itu, setelah Cina memberlakukan larangan pada impor limbah daur ulang di 2018, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat mulai mengirim limbah-limbah tersebut ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia (Wood, 2019).

Tabel 1 Bentuk Kerjasama Bilateral Indonesia dan Denmark

<i>Environmental Support Program</i> (ESP) 1998-2019	<ul style="list-style-type: none">• Fokus pada kerjasama di sektor lingkungan, energi, kehutanan dan perubahan iklim;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Dana sebesar DKK 580 juta diberikan sejak awal pelaksanaan kerjasama.
<i>Strategic Sector Cooperation (SSC)</i> pada sektor Energi dan Lingkungan 2015-	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor energi berfokus pada pemodelan energi, integrasi terhadap energi terbarukan, dan efisiensi energi; • Sektor lingkungan berfokus pada <i>circular economy</i> dan pengelolaan limbah.
<i>Sustainable Island in Indonesia (SII)</i> 2019-	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek kolaborasi dengan program SSC; • Fokus pada perencanaan dan persiapan yang menyeluruh terhadap aktivitas energy/lingkungan yang juga menekankan pada pengembangan solusi bioenergy di pada pulau-pulau di luar Pulau Jawa.

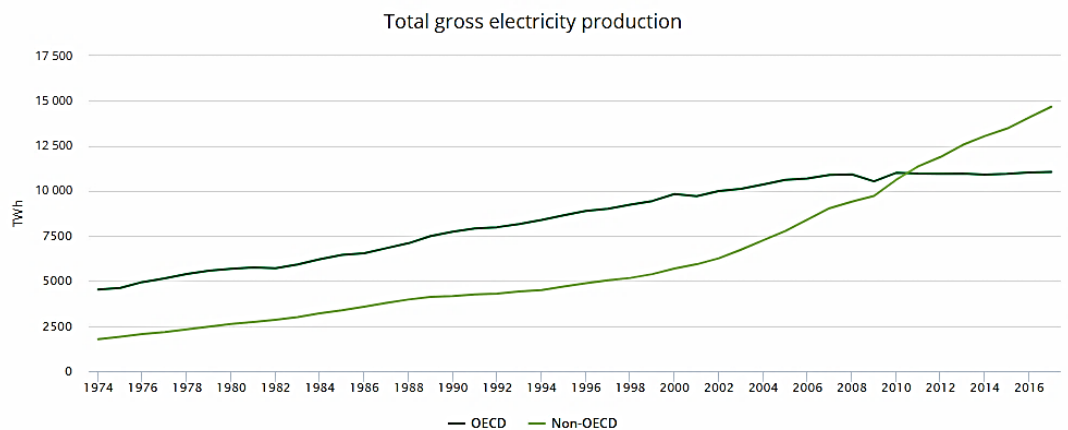
Kerjasama Indonesia-Denmark untuk manajemen lingkungan ini tertuang dalam skema kerjasama *Environmental Support Programme phase 3 (ESP3)* dimana fokus dari kerjasama di lokasi tersebut adalah *solid waste management (SWM)*. ESP sendiri dibagi menjadi tiga fase dimana fase pertama dimulai selama periode tahun 2005-2007 dimana pemerintah Denmark melalui *Danish International Development Agency (Danida)* memberikan dana sebesar 24 juta Danish kroner (DKK) untuk pengembangan lingkungan di Indonesia. Fase kedua berlangsung dari periode 2008-2012 dimana salah satu tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan kapasitas lingkungan di sektor publik serta pengurangan angka kemiskinan yang berkelanjutan melalui pengembangan

manajemen lingkungan lokal. Fase ketiga ESP yang berjalan dari tahun 2013-2018 ini memiliki tiga pilar komponen yaitu lingkungan, energi, dan hutan. Namun demikian, inti dari skema ESP3 sendiri secara umum adalah untuk memberikan konsultasi, dana, arahan serta dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam rangka transisi ke perekonomian dan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemilihan Denmark sebagai mitra kerjasama Indonesia pada sektor lingkungan hidup dan energi juga bukan tanpa sebab. Kerjasama tersebut didorong dari pengalaman dan keberhasilan Denmark dalam mengelola sampah dan transisinya dari batu bara dan minyak bumi ke energi terbarukan dalam *energy mix*nya. Keberhasilan Denmark tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang terjadi di beberapa daerah melalui program-program kerja.

Permasalahan limbah yang dialami Indonesia memang buruk, namun dengan bantuan kerjasama bersama Denmark hal tersebut dapat dijadikan solusi terkait masalah lain, terutama di sektor energi. Teknologi tanpa diragukan lagi memainkan peran yang besar dalam kehidupan manusia terutama pada abad 21 ini. Beberapa kalangan bahkan berpendapat bahwa teknologi itu seperti kebutuhan akan oksigen. Kecanggihan dan kemajuan teknologi juga terbukti dapat membantu kehidupan manusia, seperti di bidang informasi dan komunikasi serta bidang kesehatan. Kemajuan suatu hal selalu diikuti dengan tantangan. Faktanya adalah teknologi merupakan hal yang fundamental di kehidupan manusia modern. Maka tantangan yang kini tengah dan akan dihadapi adalah permintaan atas energi yang berkualitas terus meningkat. Mengambil statistik dari *International Energy Agency* (IEA), pada tahun 2017 produksi listrik di seluruh dunia meningkat sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya. Dan angka ini diprediksi akan meningkat setiap tahunnya terutama di negara non-OECD yang mayoritasnya adalah negara berkembang dan kurang berkembang (IEA, 2019).

Grafik 1 Total Produksi Listrik OECD dan Non-OECD



Sumber: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-gross-electricity-production-1974-2017>

Indonesia pun melalui Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral juga sudah memprediksi bahwa permintaan atas energi di Indonesia akan meningkat sebesar 170.8 MTOE pada tahun 2025 dan 548.8 MTOE pada tahun 2050 apabila menggunakan scenario *business-as-usual* (DEN, 2019). Tidak hanya itu, seperti yang sudah disinggung pada paragraf sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari alternative lain selain bahan bakar fosil sebagai sumber energinya apabila ingin mencapai kedua target tersebut.

Kerjasama Indonesia-Denmark yang tertuang di EPS3 ini dapat menjawab permasalahan tersebut. Teknologi serta pengetahuan yang dimiliki Denmark telah membuktikan bahwa limbah dapat diubah menjadi energi yang ramah lingkungan serta mengeluarkan sedikit emisi apabila dibandingkan dengan metode pengelolaan sampah yang tradisional. Melalui kerjasama ESP3, Denmark tidak hanya ingin sekedar memberikan dana dan konsultasi namun juga ingin memperlihatkan praktik-praktik terbaik dan transfer teknologi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan limbah sekaligus memenuhi permintaan energi negara. Praktik-praktik tersebut dilakukan melalui proyek pilot yang dilakukan di beberapa wilayah seperti di Provinsi Jawa Tengah dan

Provinsi DKI Jakarta yang fokus kepada SWM serta di Provinsi Riau yang berfokus pada restorasi lingkungan hidup di Hutan Harapan.

Pelaksanaan pilot proyek dari program ESP3 di daerah Jawa Tengah bukanlah tanpa alasan. Pemilihan Jawa Tengah sebagai lokasi pelaksanaan proyek pilot ESP3 komponen 1 dan komponen 2 merupakan hasil realisasi bahwa fokus terhadap geografik lokasi diharapkan dapat membawa hasil yang terfokuskan juga terhadap permasalahan kemiskinan. Fokusnya terhadap geografik juga dengan harapan bahwa proyek pilot dapat dilaksanakan secara transparan dan nyata, baik atas hasil atau tantangannya sehingga akan lebih mudah untuk tingkatkan menjadi lebih baik. Selain itu, pemilihan provinsi Jawa Tengah juga disebabkan oleh tingginya persentase orang miskin, tingginya kepadatan penduduk serta tingkat degradasi lingkungan yang terbilang signifikan (ESP3, 2017). Namun, pemerintah daerah untuk provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan kapabilitas serta kemampuan institusional yang tinggi sehingga proyek pilot yang dilakukan di beberapa kota di Jawa Tengah dinilai dapat dilakukan secara sinergis dan transparan.

Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota

	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Tengah	13.58	13.27	13.01
Cilacap	14.39	14.12	13.94
Klaten	14.89	14.46	14.15
Kota Semarang	4.97	4.85	4.62

Sumber: BPS. Data diolah oleh penulis.

Fokus dari penelitian ini terletak pada analisisnya terhadap proses implementasi dari kerjasama Denmark dan Indonesia melalui ESP3. Penulis melihat proses implementasi sebagai sesuatu yang menarik untuk diteliti terutama sebagai hasil dari sebuah kerjasama antar dua negara. Seringkali dalam Hubungan Internasional, hal yang difokuskan adalah hasil dari implementasi dari sebuah kerjasama sedangkan proses implementasi dari kerjasama tersebut kurang dieksplorasi oleh mahasiswa HI. Hal tersebut disayangkan oleh penulis mengingat baik proses dan

hasil dari implementasi suatu kerjasama baik bilateral maupun multilateral merupakan suatu kesinambungan yang patut untuk diteliti.

I.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya masalah limbah dan sampah serta kebutuhan energi bersih di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia dan pemerintah Denmark memutuskan untuk menjalankan skema kerjasama yang mencakup komponen lingkungan dan energi terbarukan di lokasi-lokasi yang dinilai tepat untuk skema tersebut. Hal ini juga didukung dengan keberhasilan Denmark dalam mengelola limbah sehingga kerjasama pada sektor lingkungan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Merujuk pada Latar Belakang Masalah diatas, maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kerjasama bilateral Indonesia-Denmark pada sektor lingkungan dan energi melalui ESP3 di Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan hasil implementasi dari kerjasama Indonesia dan Denmark di sektor lingkungan hidup dan energi di Provinsi Jawa Tengah melalui skema ESP3.

I.4. Manfaat Penelitian

a) Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca, terutama dari kalangan akademis, mengenai pentingnya permasalahan limbah dan bagaimana pengelolaan dari masalah tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama antar dua negara yang memiliki kapabilitas pada sektor tersebut.

b) Manfaat pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Denmark di sektor manajemen lingkungan.

- **Praktik**

Topi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi semua masyarakat bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat terendah dari masyarakat yaitu dari rumah tangga dan limbah sendiri apabila dapat diolah dengan benar dapat memiliki nilai lebih atau menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat.

I.5. Sistematika Penelitian

Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan topik masalah dari penelitian secara garis besar seperti faktor-faktor pendorong diadakannya kerjasama antara Indonesia dan Denmark dan kondisi di kedua negara terkait topik masalah penelitian. Bab ini juga akan memaparkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dari penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan secara singkat inti dari *literature review* yang digunakan sebagai pembanding dan penguat dari penelitian ini. *Literature review* ini dapat berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, maupun skripsi. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan sebagai referensi saat menganalisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memaparkan grafik alur pemikiran yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian serta proposisi dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta jadwal dan lokasi penelitian.

BAB IV Kemunculan Gelombang Environmentalisme di Dunia Internasional

Bab pembahasan ini terbagi menjadi empat subbab. Pada subbab pertama, peneliti akan menjelaskan tentang meningkatnya kesadaran di dunia internasional mengenai permasalahan lingkungan yang mendorong isu-isu non-tradisional ke depan agenda politik internasional serta timbulnya krisis pengelolaan limbah secara global. Pada subbab kedua, peneliti akan menjelaskan dinamika kebijakan Denmark dalam manajemen lingkungan. Subbab ketiga penulis akan berfokus pada hal-hal yang seringkali menjadi hambatan dan tantangan pada pengelolaan limbah di negara berkembang dan juga krisis limbah di Indonesia. Subbab terakhir yakni subbab keempat akan membahas tentang kerjasama bilateral dalam sektor lingkungan dan energi yang dilakukan antara Indonesia dan Denmark. Penulis juga akan menjelaskan dinamika dari kerjasama ESP dimulai dari fase pertama sampai dengan fase ketiga.

BAB V Kerjasama Indonesia dan Denmark pada Sektor Lingkungan dan Energi melalui *Environmental Support Programme – Phase III (ESP3)*

Pada bab analisis peneliti akan membagi bagian ini menjadi dua subbab dimana subbab pertama akan menjabarkan dan menganalisis implementasi dari kerjasama Denmark dan Indonesia pada sektor perlindungan lingkungan dan energi melalui ESP3 yang berjalan selama periode 2013-2019. Peneliti juga akan melihat apakah proyek pilot yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah telah diimplementasikan dengan baik. Dalam analisisnya, penulis akan mengacu pada konsep-konsep yang relevan untuk melihat proses implementasi dari program kerjasama antara Indonesia dan Denmark. Pada subbab kedua, penulis akan menjelaskan tantangan dan risiko yang teridentifikasi saat dan setelah pelaksanaan implementasi dari kerjasama ESP3 antara Indonesia dan Denmark.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan atas analisis yang sudah dilakukan secara singkat dan jelas. Peneliti juga akan menuliskan saran serta kritik atas penelitian yang dilakukan peneliti.